



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : BIDANG KEOLAHRAGAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNCORO DWI WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI
3. NHK : 519083

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/160 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/200 m2 di KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.600.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 801.000.000

1. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO EXCEED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 407.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 299.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 891.938.047**F. HARTA LAINNYA** Rp. 3.447.300.000

Sub Total Rp. 8.319.438.047

III. HUTANG Rp. 321.125.152



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.998.312.895

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.